



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.103,2015

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
Tata, Cara, pembagian, penetapan, rincian, dana desa, Kabupaten  
Bantul, Tahun Anggaran 2016.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 103 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa dan pedoman teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 57171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II PEMBAGIAN DANA DESA (DD) Bagian Kesatu Rincian Dana Desa (DD)

## Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Bantul sebesar Rp. 60.601.265.000,- (enam puluh milyar enam ratus satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar, dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa
- (3) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebesar Rp. 42.423.000.000,00 (empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) dibagi rata untuk 75 ( tujuh puluh lima ) desa.
- (4) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebesar Rp. 18.178.265.000,00 (delapan belas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikalikan total bobot dari indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yaitu sebagai berikut :

$$W = ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)) * (10\% * \text{Rp. } 60.601.265.000)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa berdasar formula

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Bantul.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Bantul.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa se-Kabupaten Bantul.

Z4 = rasio Indek Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Kabupaten Bantul.

- (5) Besaran dana desa masing desa merupakan hasil penjumlahan dari penghitungan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) dan (4).
- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (7) Indeks tingkat kesulitan geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian DD merupakan jumlah DD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Hasil Perhitungan dan Rincian alokasi DD untuk setiap Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa Tahun 2016; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun 2015,
- (5) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan DD diatur sebagai berikut :
  - a. Pencairan DD Tahap I :
    1. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
      - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
      - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
      - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
      - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
      - e) Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Tahun 2015.
      - f) fotocopy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015.

2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
    - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
    - b) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
    - c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
    - d) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
    - f) Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Tahun 2015
    - g) fotocopy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015
  3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
    - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
    - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
    - c) Surat Permohonan dari Camat;
    - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
    - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
    - f) kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
    - h) Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Tahun 2015
    - i) fotocopy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015
- b. Pencairan DD Tahap II :
1. Lurah Desa mengajukan pencairan DD Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
    - a) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa semester I tahun 2016 ;
    - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - c) kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
    - d) fotocopy nomor Rekening Kas Desa (RKD).
    - e) Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Semester I tahun 2016
  2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan DD Tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
    - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
    - b) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa semester I tahun 2016;
    - c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - d) kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
    - e) Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Semester I tahun 2016

3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD Tahap II;
  - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
  - c) Surat Permohonan dari Camat;
  - d) Laporan realisasi Penggunaan DD semester I tahun 2016 ;
  - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - f) kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
  - g) Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Semester I tahun 2016.

c. Pencairan DD Tahap III :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan DD Tahap III kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
  - a) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - b) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD Tahap III kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
  - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
  - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - c) kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD Tahap III;
  - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
  - c) Surat Permohonan dari Camat;
  - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - e) kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.

(2) Berdasarkan permohonan pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III langsung ke Rekening Kas Desa.

(3) Format Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGUNAAN DD

#### Pasal 7

- (1) DD dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Carik Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pemungutan pajak yang dipungutnya, ke rekening Kas Negara untuk pajak pusat atau Rekening Kas Daerah untuk pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Camat mengkoordinasikan Lurah Desa setempat dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan DD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.



### Pasal 11

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Lurah Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan DD semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPa DD Tahun Anggaran 2015 lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penundaan penyaluran DD Tahap I tahun anggaran 2016 sebesar SiLPa DD Tahun Anggaran 2015.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah yang lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan kinerja terhadap pelaksanaan pengelolaan DD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan DD.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTA RAHARJA

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

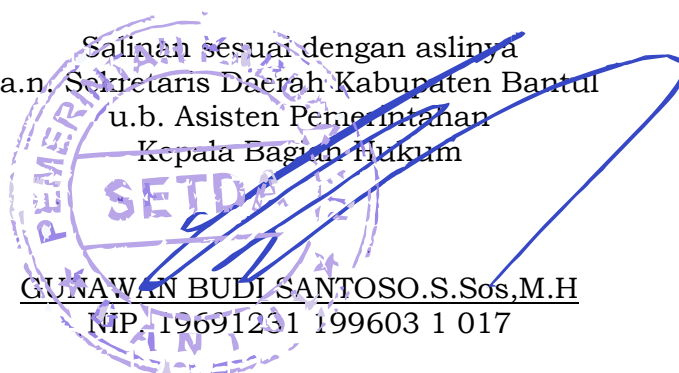
ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 103 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2016

PERHITUNGAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)		
1	SRANDAKAN	PONCOSARI	565,640,000	14064	0.014658505	0.003664626	2527	0.015619881	0.005466958	11.775315	0.023173824	0.002317382	21.880697	0.011965419	0.003589626	0.015038593	273,375,525	839,016,000	
2	SRANDAKAN	TRIMURTI	565,640,000	18332	0.019106919	0.00477673	3863	0.023877958	0.008357285	6.219782	0.012240533	0.001224053	21.121945	0.011550497	0.003465149	0.017823218	323,995,175	889,637,000	
3	SANDEN	GADINGSARI	565,640,000	12106	0.012617738	0.003154434	2498	0.015440627	0.005404219	8.17227	0.01608303	0.001608303	22.107168	0.012089264	0.003626779	0.013793736	250,746,189	816,386,000	
4	SANDEN	GADINGHARJO	565,640,000	4033	0.004203481	0.00105087	818	0.005056218	0.001769676	3.099826	0.006100459	0.000610046	37.810467	0.020676585	0.006202975	0.009633568	175,121,547	740,762,000	
5	SANDEN	SRI GADING	565,640,000	10830	0.011287799	0.00282195	1853	0.011453755	0.004008814	7.628794	0.015013469	0.001501347	19.260444	0.010532539	0.003159762	0.011491873	208,902,307	774,542,000	
6	SANDEN	MURTIGADING	565,640,000	9532	0.009934931	0.002483733	1350	0.008344614	0.002920615	4.408195	0.008675329	0.000867533	25.198206	0.013779593	0.004133878	0.010405758	189,158,635	754,799,000	
7	KRETEK	TIRTOMULYO	565,640,000	7543	0.007861853	0.001965463	1104	0.00682404	0.002388414	4.216972	0.008299002	0.0008299	21.74119	0.01188913	0.003566739	0.008750517	159,069,208	724,709,000	
8	KRETEK	PARANGTRITIS	565,640,000	7702	0.008027574	0.002006894	788	0.004870782	0.001704774	11.946409	0.023510537	0.002351054	16.34381	0.008937583	0.002681275	0.008743996	158,950,673	724,591,000	
9	KRETEK	DONOTIRTO	565,640,000	9735	0.010146512	0.002536628	1230	0.007602871	0.002661005	4.730255	0.009309143	0.000930914	17.333116	0.009478583	0.002843575	0.008972122	163,097,610	728,738,000	
10	KRETEK	TIRTOSARI	565,640,000	5012	0.005223864	0.001305966	892	0.005513626	0.001929769	2.405385	0.004733798	0.00047338	32.310449	0.01766891	0.005300673	0.009009788	163,782,317	729,422,000	
11	KRETEK	TIRTOHARJO	565,640,000	3007	0.00313411	0.000783528	403	0.002491022	0.000871858	3.643303	0.007170021	0.000717002	36.249486	0.019822965	0.00594689	0.008319277	151,230,020	716,870,000	
12	PUNDONG	SELOHARJO	565,640,000	13837	0.014421909	0.003605477	2866	0.017715306	0.006200357	11.171453	0.021985423	0.002198542	27.796404	0.015200413	0.004560124	0.016564501	301,113,884	866,754,000	
13	PUNDONG	PANJANG REJO	565,640,000	11515	0.012001755	0.003000439	1736	0.010730556	0.003755694	5.746756	0.011309618	0.001130962	28.38439	0.015521952	0.004656586	0.012543681	228,022,349	793,662,000	
14	PUNDONG	SRI HARDONO	565,640,000	13082	0.013634994	0.003408749	2025	0.012516921	0.004380922	6.914223	0.013607193	0.001360719	21.746198	0.011891869	0.003567561	0.012717951	231,190,281	796,830,000	
15	BAMBANG LIPURO	SIDOMULYO	565,640,000	16858	0.017570611	0.004392653	3482	0.021522923	0.007533023	8.101819	0.015944382	0.001594438	25.353402	0.013864462	0.004159338	0.017679453	321,381,774	887,022,000	
16	BAMBANG LIPURO	MULYODADI	565,640,000	12440	0.012965856	0.003241464	2384	0.01473597	0.005157559	6.49152	0.012775313	0.001277531	21.76124	0.011900094	0.003570028	0.013246613	240,800,447	806,440,000	
17	BAMBANG LIPURO	SUMBER MULYO	565,640,000	18132	0.018898465	0.004724616	3304	0.02042267	0.007147935	8.252785	0.016241484	0.001624148	17.227148	0.009420634	0.002826219	0.016322889	296,721,811	862,362,000	
18	PANDAK	CATUHARJO	565,640,000	13033	0.013583923	0.003395981	3074	0.019000995	0.006650348	5.978237	0.011765172	0.001176517	24.105606	0.013182107	0.003954632	0.015177478	275,900,223	841,540,000	
19	PANDAK	TRI HARJO	565,640,000	11976	0.012482242	0.003120561	5030	0.031091414	0.010881995	6.471391	0.01273757	0.001273757	28.452531	0.015559215	0.004667764	0.01994389	362,545,312	928,185,000	
20	PANDAK	GILANG HARJO	565,640,000	16726	0.017433031	0.004358258	4525	0.02796991	0.009789468	7.346991	0.014458881	0.001445888	22.000989	0.012031201	0.003600936	0.019202975	349,076,761	914,717,000	
21	PANDAK	WIJIREJO	565,640,000	12098	0.012609399	0.00315235	2300	0.01421675	0.004975862	4.740319	0.009328949	0.000932895	23.073971	0.012617959	0.003785388	0.012846495	233,526,988	799,167,000	
22	PAJANGAN	TRI WIDADI	565,640,000	11488	0.011973614	0.002993403	4700	0.029051619	0.010168067	12.781752	0.025154492	0.002515449	35.295409	0.01930123	0.005790369	0.021467288	390,238,057	955,878,000	
23	PAJANGAN	SENDANGSARI	565,640,000	11456	0.011940261	0.002985065	4270	0.026393705	0.009237797	11.835701	0.023292663	0.002329266	36.713862	0.020076908	0.006023073	0.020575201	374,021,455	939,661,000	
24	PAJANGAN	GUWOSARI	565,640,000	11621	0.012112236	0.003028059	3455	0.021356031	0.007474611	8.836518	0.01739027	0.001739027	23.990022	0.01311189	0.00393567	0.016177367	294,076,458	859,716,000	
25	BANTUL	PALBAPANG	565,640,000	15401	0.016052022	0.004013005	1814	0.011212689	0.003924441	5.555533	0.010933291	0.001093329	18.577506	0.010159075	0.003047723	0.012078498	219,566,141	785,206,000	
26	BANTUL	RINGIN HARJO	565,640,000	8691	0.009058381	0.002264595	1160	0.007170187	0.002509565	2.787831	0.005486452	0.000548645	26.92292	0.01472275	0.004416825	0.009739631	177,049,588	742,690,000	
27	BANTUL	BANTUL	565,640,000	17222	0.017949998	0.00448875	1408	0.008703123	0.003046093	5.273731	0.010378704	0.00103787	15.488258	0.008469726	0.002540918	0.011112381	202,003,803	767,644,000	
28	BANTUL	TRIRENGGO	565,640,000	17434	0.01817096	0.00454274	2289	0.014148757	0.004952065	6.139267	0.012082079	0.001208208	30.359505	0.01660204	0.004980612	0.015683625	285,101,085	850,741,000	
29	BANTUL	SABDODADI	565,640,000	6215	0.006477717	0.001619429	863	0.005334372	0.00186703	2.334934	0.004595151	0.000459515	23.668792	0.012943236	0.003882971	0.007828945	142,316,639	707,957,000	
30	JETIS	PATALAN	565,640,000	12262	0.012780332	0.003195083	1973	0.012195499	0.004268425	5.68637	0.011190778	0.001119078	15.454158	0.008451078	0.002535323	0.011117909	202,104,292	767,744,000	
31	JETIS	CANDEN	565,640,000	13384	0.01394976	0.00348744	2237	0.013827334	0.004839567	5.394503	0.010616384	0.001061638	26.05386	0.014247506	0.004274252	0.013662897	248,367,767	814,008,000	
32	JETIS	SUMBER AGUNG	565,640,000	16459	0.017154745	0.004288686	2646	0.016355443	0.005724405	6.390876	0.012577246	0.001257725	21.348854	0.011674582	0.003502375	0.014773191	268,550,974	834,191,000	
33	JETIS	TRIMULYO	565,640,000	17273	0.018003154	0.004500788	2670	0.016503792	0.005776327	7.155768	0.014082554	0.001408255	20.448544	0.011182249	0.003354675	0.015040046	273,401,938	839,042,000	
34	IMOIRI	SELOPAMIORO	565,640,000	16000	0.016676342	0.004169086	3347	0.020688462	0.007240962	22.896446	0.045060213	0.004506021	23.298822	0.012740918	0.003822275	0.019738344	358,808,847	924,449,000	
35	IMOIRI	SRIHARJO	565,640,000	10221	0.010653056	0.002663264	1791	0.011070521	0.003874682	5.04225	0.00992315	0.000992315	27.208417	0.014878873	0.004463662	0.011993923	218,028,717	783,669,000	
36	IMOIRI	WUKIRSARI	565,640,000	16398	0.017091166	0.004272792	4048	0.02502148	0.008757518	15.479004	0.030462685	0.003046268	21.973005	0.012015898	0.003604769	0.019681347	357,772,746	923,413,000	
37	IMOIRI	KEBONAGUNG	565,640,000	4327	0.004509908	0.001127477	546	0.003374933	0.001181226	1.811587	0.003565204	0.00035652	26.144302	0.014296964	0.004298089	0.006954313	126,417,346	692,057,000	
38	IMOIRI	KARANG TENGAH	565,640,000	5492	0.005724155	0.001431039	913	0.005											

47	DLINGO	JATIMULYO	565,640,000	7857	0.008189126	0.002047282	2479	0.015323184	0.005363114	8.967355	0.017647757	0.001764776	39.564914	0.021636001	0.0064908	0.015665972	284,780,190	850,420,000
48	BANGUNTAPAN	BATURETNO	565,640,000	12776	0.013316059	0.003329015	1159	0.007164006	0.002507402	3.733882	0.007348281	0.000734828	18.948595	0.010362005	0.003108601	0.009679846	175,962,811	741,603,000
49	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	565,640,000	43042	0.044861446	0.011215361	1807	0.01116942	0.003909297	8.24272	0.016221676	0.001622168	12.073579	0.006602415	0.001980724	0.01872755	340,434,376	906,074,000
50	BANGUNTAPAN	JAGALAN	565,640,000	3342	0.003483271	0.000870818	250	0.001545299	0.000540855	0.271738	0.00053478	5.3478E-05	31.899386	0.017444121	0.005233236	0.006698387	121,765,049	687,405,000
51	BANGUNTAPAN	SINGOSAREN	565,640,000	3781	0.003940828	0.000985207	369	0.002280861	0.000798301	0.684377	0.001346854	0.000134685	24.690196	0.013501789	0.004050537	0.00596873	108,501,164	674,141,000
52	BANGUNTAPAN	JAMBITAN	565,640,000	10062	0.010487335	0.002621834	1666	0.010297872	0.003604255	3.774139	0.007427507	0.000742751	34.562601	0.018900495	0.005670149	0.012638988	229,754,875	795,395,000
53	BANGUNTAPAN	POTORONO	565,640,000	11122	0.011592143	0.002898036	2130	0.013165947	0.004608081	3.925105	0.007724608	0.000772461	15.181986	0.008302241	0.002490672	0.01076925	195,766,282	761,406,000
54	BANGUNTAPAN	TAMANAN	565,640,000	11943	0.012447847	0.003111962	1581	0.00977247	0.003420365	3.774139	0.007427507	0.000742751	19.534712	0.010682522	0.003204756	0.010479834	190,505,192	756,145,000
55	BANGUNTAPAN	WIROKERTEN	565,640,000	12402	0.01292625	0.003231562	2311	0.014284743	0.00499966	3.884847	0.00764538	0.000764538	22.093492	0.012081786	0.003624536	0.012620296	229,415,090	795,055,000
56	PLERET	WONOKROMO	565,640,000	17242	0.017970843	0.004492711	2020	0.012486015	0.004370105	4.32768	0.008516876	0.000851688	18.619351	0.010181958	0.003054587	0.012769091	232,119,922	797,760,000
57	PLERET	PLERET	565,640,000	14754	0.015377672	0.003844418	1930	0.011929707	0.004175398	4.32768	0.008516876	0.000851688	17.110503	0.009356847	0.002807054	0.011678557	212,295,912	777,936,000
58	PLERET	SEGOROYOSO	565,640,000	11192	0.011665102	0.002916275	1671	0.010328778	0.003615072	4.931542	0.009705276	0.000970528	24.251465	0.013261869	0.003978561	0.011480436	208,694,409	774,334,000
59	PLERET	BAWURAN	565,640,000	6506	0.006781018	0.001695254	1096	0.00677459	0.002371107	4.941607	0.009725084	0.000972508	36.733556	0.020087678	0.006026303	0.011065173	201,145,645	766,786,000
60	PLERET	WONOLELO	565,640,000	5664	0.005903425	0.001475856	1089	0.006731322	0.002355963	4.528967	0.008913008	0.000891301	34.972793	0.019124808	0.005737442	0.010460562	190,154,873	755,795,000
61	PIYUNGAN	SITIMULYO	565,640,000	14220	0.014821099	0.003705275	2134	0.013190671	0.004616735	9.460509	0.018618285	0.001861828	16.188675	0.008852747	0.002655824	0.012839662	233,402,787	799,043,000
62	PIYUNGAN	SRIMULYO	565,640,000	15215	0.015858159	0.00396454	2216	0.013697529	0.004794135	14.693983	0.028917763	0.002891776	16.554773	0.009052947	0.002715884	0.014366336	261,155,057	826,795,000
63	PIYUNGAN	SRIMARTANI	565,640,000	15171	0.015812299	0.003953075	2845	0.017585501	0.006154925	8.957291	0.017627952	0.001762795	22.507892	0.0123084	0.00369252	0.015563315	282,914,071	848,554,000
64	SEWON	PENDOWOHARJO	565,640,000	19634	0.020463957	0.005115989	2021	0.012492196	0.004372269	7.024931	0.013825066	0.001382507	18.92005	0.010346395	0.003103918	0.013974683	254,035,490	819,675,000
65	SEWON	TIMBULHARJO	565,640,000	17682	0.018429443	0.004607361	3630	0.02243774	0.007853209	7.830081	0.015409602	0.00154096	17.308167	0.00946494	0.002839482	0.016841012	306,140,374	871,780,000
66	SEWON	BANGUNHARJO	565,640,000	20189	0.021042417	0.005260604	3893	0.024063394	0.008422188	6.833708	0.01344874	0.001344874	11.272916	0.006164574	0.001849372	0.016877038	306,795,276	872,435,000
67	SEWON	PANGGUNGHARJO	565,640,000	27150	0.028297669	0.007074417	2833	0.017511327	0.006128964	5.646113	0.011111552	0.001111155	15.353793	0.008396194	0.002518858	0.016833395	306,001,914	871,642,000
68	KASIHAN	BANGUIWO	565,640,000	27084	0.028228879	0.00705722	5225	0.032296747	0.011303861	15.529326	0.030561719	0.003056172	31.545	0.017250326	0.005175098	0.026592351	483,402,796	1,049,043,000
69	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	565,640,000	24917	0.025970277	0.006492569	2806	0.017344435	0.006070552	5.163023	0.010160831	0.001016083	15.913267	0.008702141	0.002610642	0.016189847	294,303,323	859,943,000
70	KASIHAN	TAMANTIRTO	565,640,000	25073	0.026132871	0.006533218	2607	0.016114377	0.005640032	6.763258	0.013310094	0.001331009	33.377799	0.018252693	0.005475808	0.018980067	345,024,685	910,665,000
71	KASIHAN	NGESTIHARJO	565,640,000	33044	0.034440816	0.008610204	2957	0.018277795	0.006397228	5.13283	0.010101411	0.001010141	15.93873	0.008716065	0.00261482	0.018632393	338,704,580	904,345,000
72	SEDAYU	ARGODADI	565,640,000	12252	0.012769909	0.003192477	3623	0.022394472	0.007838065	11.272096	0.022183489	0.002218349	34.935546	0.01910444	0.005731332	0.018980223	345,027,524	910,668,000
73	SEDAYU	ARGOREJO	565,640,000	13238	0.013797589	0.003449397	2401	0.014841051	0.005194368	7.246348	0.014260815	0.001426082	23.03202	0.012595018	0.003778505	0.013848352	251,739,010	817,379,000
74	SEDAYU	ARGOSARI	565,640,000	9051	0.009433598	0.0023584	1954	0.012078056	0.00422732	6.441198	0.01267628	0.001267628	23.580883	0.012895163	0.003868549	0.011721896	213,083,733	778,724,000
75	SEDAYU	ARGOMULYO	565,640,000	15018	0.015652832	0.003913208	1858	0.011484661	0.004019631	9.561153	0.018816352	0.001881635	20.883766	0.011420249	0.003426075	0.013240549	240,690,217	806,330,000
Total			42,423,000,000	959443	1	0.25	161781	1	0.35	508.129999	1	0.1	1828.66113	1	0.3	1	18,178,265,000	60,601,265,000

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 103 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL

NO	Desa	Alokasi DD	Pencairan Tahap I	Pencairan Tahap II	Pencairan Tahap III
1	PONCOSARI	839,016,000	335,606,400	335,606,400	167,803,200
2	TRIMURTI	889,637,000	355,854,800	355,854,800	177,927,400
3	GADINGSARI	816,386,000	326,554,400	326,554,400	163,277,200
4	GADINGHARJO	740,762,000	296,304,800	296,304,800	148,152,400
5	SRIGADING	774,542,000	309,816,800	309,816,800	154,908,400
6	MURTIGADING	754,799,000	301,919,600	301,919,600	150,959,800
7	TIRTOMULYO	724,709,000	289,883,600	289,883,600	144,941,800
8	PARANGTRITIS	724,591,000	289,836,400	289,836,400	144,918,200
9	DONOTIRTO	728,738,000	291,495,200	291,495,200	145,747,600
10	TIRTOSARI	729,422,000	291,768,800	291,768,800	145,884,400
11	TIRTOHARJO	716,870,000	286,748,000	286,748,000	143,374,000
12	SELOHARJO	866,754,000	346,701,600	346,701,600	173,350,800
13	PANJANG REJO	793,662,000	317,464,800	317,464,800	158,732,400
14	SRIHARDONO	796,830,000	318,732,000	318,732,000	159,366,000
15	SIDOMULYO	887,022,000	354,808,800	354,808,800	177,404,400
16	MULYODADI	806,440,000	322,576,000	322,576,000	161,288,000
17	SUMBER MULYO	862,362,000	344,944,800	344,944,800	172,472,400
18	CATUHARJO	841,540,000	336,616,000	336,616,000	168,308,000
19	TRIHARJO	928,185,000	371,274,000	371,274,000	185,637,000
20	GILANG HARJO	914,717,000	365,886,800	365,886,800	182,943,400
21	WIJIREJO	799,167,000	319,666,800	319,666,800	159,833,400
22	TRI WIDADI	955,878,000	382,351,200	382,351,200	191,175,600
23	SENDANGSARI	939,661,000	375,864,400	375,864,400	187,932,200
24	GUWOSARI	859,716,000	343,886,400	343,886,400	171,943,200
25	PALBAPANG	785,206,000	314,082,400	314,082,400	157,041,200
26	RINGIN HARJO	742,690,000	297,076,000	297,076,000	148,538,000
27	BANTUL	767,644,000	307,057,600	307,057,600	153,528,800
28	TRIENGGO	850,741,000	340,296,400	340,296,400	170,148,200
29	SABDODADI	707,957,000	283,182,800	283,182,800	141,591,400
30	PATALAN	767,744,000	307,097,600	307,097,600	153,548,800
31	CANDEN	814,008,000	325,603,200	325,603,200	162,801,600
32	SUMBER AGUNG	834,191,000	333,676,400	333,676,400	166,838,200
33	TRIMULYO	839,042,000	335,616,800	335,616,800	167,808,400
34	SELOPAMIORO	924,449,000	369,779,600	369,779,600	184,889,800
35	SRIHARJO	783,669,000	313,467,600	313,467,600	156,733,800
36	WUKIRSARI	923,413,000	369,365,200	369,365,200	184,682,600
37	KEBONAGUNG	692,057,000	276,822,800	276,822,800	138,411,400
38	KARANG TENGAH	755,621,000	302,248,400	302,248,400	151,124,200
39	GIRIREJO	732,426,000	292,970,400	292,970,400	146,485,200
40	KARANGTALUN	665,354,000	266,141,600	266,141,600	133,070,800
41	IMOGIRI	658,451,000	263,380,400	263,380,400	131,690,200
42	MANGUNAN	757,624,000	303,049,600	303,049,600	151,524,800
43	MUNTUK	794,380,000	317,752,000	317,752,000	158,876,000
44	DLINGO	794,035,000	317,614,000	317,614,000	158,807,000



45	TEMUWUH	787,349,000	314,939,600	314,939,600	157,469,800
46	TERONG	744,532,000	297,812,800	297,812,800	148,906,400
47	JATIMULYO	850,420,000	340,168,000	340,168,000	170,084,000
48	BATURETNO	741,603,000	296,641,200	296,641,200	148,320,600
49	BANGUNTAPAN	906,074,000	362,429,600	362,429,600	181,214,800
50	JAGALAN	687,405,000	274,962,000	274,962,000	137,481,000
51	SINGOSAREN	674,141,000	269,656,400	269,656,400	134,828,200
52	JAMBITAN	795,395,000	318,158,000	318,158,000	159,079,000
53	POTORONO	761,406,000	304,562,400	304,562,400	152,281,200
54	TAMANAN	756,145,000	302,458,000	302,458,000	151,229,000
55	WIROKERTEN	795,055,000	318,022,000	318,022,000	159,011,000
56	WONOKROMO	797,760,000	319,104,000	319,104,000	159,552,000
57	PLERET	777,936,000	311,174,400	311,174,400	155,587,200
58	SEGOROYOSO	774,334,000	309,733,600	309,733,600	154,866,800
59	BAWURAN	766,786,000	306,714,400	306,714,400	153,357,200
60	WONOLELO	755,795,000	302,318,000	302,318,000	151,159,000
61	SITIMULYO	799,043,000	319,617,200	319,617,200	159,808,600
62	SRIMULYO	826,795,000	330,718,000	330,718,000	165,359,000
63	SRIMARTANI	848,554,000	339,421,600	339,421,600	169,710,800
64	PENDOWOHARJO	819,675,000	327,870,000	327,870,000	163,935,000
65	TIMBULHARJO	871,780,000	348,712,000	348,712,000	174,356,000
66	BANGUNHARJO	872,435,000	348,974,000	348,974,000	174,487,000
67	PANGGUNGHARJO	871,642,000	348,656,800	348,656,800	174,328,400
68	BANGUJIWO	1,049,043,000	419,617,200	419,617,200	209,808,600
69	TIRTONIRMOLO	859,943,000	343,977,200	343,977,200	171,988,600
70	TAMANTIRTO	910,665,000	364,266,000	364,266,000	182,133,000
71	NGESTIHARJO	904,345,000	361,738,000	361,738,000	180,869,000
72	ARGODADI	910,668,000	364,267,200	364,267,200	182,133,600
73	ARGOREJO	817,379,000	326,951,600	326,951,600	163,475,800
74	ARGOSARI	778,724,000	311,489,600	311,489,600	155,744,800
75	ARGOMULYO	806,330,000	322,532,000	322,532,000	161,266,000
<b>JUMLAH</b>		<b>60,601,265,000</b>	<b>24,240,506,000</b>	<b>24,240,506,000</b>	<b>12,120,253,000</b>

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                      TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH FORMAT  
LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD

A. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP I

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Pencairan DD Tahap I dari Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa		
1.5	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.6	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
1.7	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD)		
1.8	Laporan Realisasi DD Semester II Tahun 2015		
1.9	Fotocopy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		
2.3	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) yang dilampirkan telah divalidasi sesuai aslinya.		

Bantul,  
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

.....



## B. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP II

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Pencairan DD Tahap II dari Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Laporan Realisasi Penggunaan DD Semester I		
1.5	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.4	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,  
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

.....

## 3. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP III

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Pencairan DD Tahap III dari Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.5	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,  
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

.....

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SIGIT SAPTO RAHARJO